

## **ABSTRAK**

### **DAMPAK KEBIJAKAN PENETAPAN SEKRETARIS DESA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP POLA KOMUNIKASI DAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**Oleh: Aprilia Lestari**

Kebijakan penetapan sekretaris desa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sebagian besar desa di kabupaten Ogan Komering Ulu belum didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup, seperti kantor desa. Perubahan status sekretaris desa menjadi PNS-pun melahirkan kecemburuan sosial dari kepala desa dan perangkat desa non-PNS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak kebijakan tersebut secara kualitatif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan kunci, observasi penulis, serta dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan dampak kebijakan penetapan sekretaris desa sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah; dampak terhadap pola komunikasi (1) belum terbentuk mekanisme jalur komunikasi yang disepakati bersama (2) garis komunikasi pada pemerintahan desa mengalami perubahan karena sekretaris desa memiliki dua loyalitas, kepada camat dan kepala desa (3) hambatan komunikasi lebih pada persoalan kecemburuan sosial karena status PNS sekretaris desa menimbulkan ketimpangan status sosial, jenjang karir, dan gaji. Dampak pada kinerja (1) belum terlihat peningkatan produktivitas pemerintahan desa pasca kebijakan ini (2) ketidakjelasan waktu dan prosedur layanan di desa menunjukkan masih belum optimalnya kualitas layanan (3) responsivitas belum terselenggara secara baik (4) masih belum tertibnya buku administrasi desa dan fungsi pemerintahan kepada masyarakat yang belum terselenggara dengan baik menunjukkan kurangnya responsibilitas sekretaris desa (5) akuntabilitas terhadap tugas juga belum optimal serta akuntabilitas keuangan pemerintahan desa belum tersusun secara rapi dan detail.

Kata kunci: pola komunikasi, kinerja, sekretaris desa.